

TESIS

**PELAKSANAAN RESUSITASI PADA BAYI BARU LAHIR
UNTUK MENJAMIN PEMENUHAN HAK ANAK ATAS
KESEHATAN DI RSUD KOTA TANJUNGPINANG**

ROSALYN BERNADETH ELIM

NIM: 21.C2.0031

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

TESIS

PELAKSANAAN RESUSITASI PADA BAYI BARU LAHIR UNTUK MENJAMIN PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN DI RSUD KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

ROSALYN BERNADETH ELIM

NIM: 21.C2.0031

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam negara. Pemenuhan hak anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU, No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan khususnya di bidang kesehatan semakin dipertegas melalui UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Resusitasi Neonatus merupakan tindakan medis terpenting dalam pertolongan gawat napas pada bayi baru lahir (asfiksia) yang pelaksanaannya merupakan bentuk dari pemenuhan hak atas anak.

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang pengaturan, pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan resusitasi bayi baru lahir untuk menjamin pemenuhan hak anak atas kesehatan di RSUD Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan terkait resusitasi bayi baru lahir di RSUD Tanjungpinang sudah mengikuti aturan yang tersedia yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun profesi. Pelaksanaan resusitasi neonatus selalu dilakukan sesuai dengan SPO dan pemenuhan hak anak atas kesehatan telah berjalan dengan baik. Kurang baiknya komunikasi dan kerjasama tim resusitasi serta belum semua petugas memiliki kompetensi yang bersertifikat menjadi faktor penghambat di dalam pelaksanaan bayi baru lahir di RSUD Tanjungpinang. Oleh karena itu pentingnya penyempurnaan SPO dan pembuatan petunjuk teknis serta peningkatan kompetensi bagi tim resusitasi di RSUD Tanjungpinang.

Kata Kunci: Resusitasi Neonatus, Hak Pelayanan Kesehatan, Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan

ABSTRACT

Indonesia is a country governed by law, recognizing and protecting human rights. The fulfillment of children's rights is stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, and specifically in the health sector, further emphasized through Law No. 17 of 2023 concerning Health, and is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Neonatal resuscitation is the most important medical procedure for assisting newborns with respiratory distress (asphyxia), and its implementation demonstrates the fulfillment of children's rights.

The research problem formulation in this study addresses the regulation, implementation, and supporting and inhibiting factors in the implementation of newborn resuscitation to ensure the fulfillment of children's rights to health at Tanjungpinang City Hospital. This study uses a sociological-juridical approach, analyzed qualitatively using primary and secondary data. Primary data were obtained directly through interviews, and secondary data were obtained through literature review. The results of the study indicate that the arrangements related to newborn resuscitation at Tanjungpinang Regional Hospital have complied with the existing regulations issued by the government and the profession. The implementation of neonatal resuscitation is always carried out in accordance with the SOP and the fulfillment of children's rights to health has been running well. Poor communication and cooperation between the resuscitation team and not all officers have certified competencies are inhibiting factors in the implementation of newborn resuscitation at Tanjungpinang Regional Hospital. Therefore, it is important to improve the SOP and create technical instructions and improve the competence of the resuscitation team at Tanjungpinang Regional Hospital.

Keywords: Neonatal Resuscitation, Right to Health Services, Fulfillment of Children's Rights to Health